

Rasionalitas Publik di Pilkada

PROKAL.CO,

Catatan: Rina Juwita

Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak semakin mendekati saat yang menentukan. Tahapan demi tahapan pemilihan langsung pada 27 Juni terus dilalui oleh 171 daerah termasuk Kaltim. Itu untuk menentukan para pemimpin daerah lima tahun ke depan.

Pilkada ini merupakan fase kritis pembuktian reliabilitas proses demokrasi elektoral pada masa sekarang dan masa mendatang, apalagi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Maka, penting kiranya diperhatikan bahwa manajemen pemilu kali ini harus berhasil, tidak hanya dalam konteks prosedur tapi juga substansinya.

Pelaksanaan pilkada serentak benar-benar merupakan perayaan nasional untuk mewujudkan transformasi historis, konsolidasi demokrasi dari level regional menuju level nasional. Maka, pilkada kali ini harus bisa merefleksikan kesukarelaan dan juga partisipasi masyarakat dalam politik.

Robert A Dahl, profesor ilmu politik dari Yale University, menekankan dua variabel penting dalam demokrasi. Yakni, adanya kontestasi dan partisipasi. Hal ini menyiratkan, kualitas demokrasi pilkada tidak hanya ditentukan oleh para kandidat yang bertarung, tapi juga tingkat partisipasi publik.

Salah satu elemen penting yang harus dipahami semua pihak yang terlibat dalam pesta rakyat ini adalah komunikasi yang baik untuk menghindari konflik. Baik itu sebelum, ketika, dan setelah pilkada berlangsung.

Pertama, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan semua pasangan calon (paslon) harus bisa membangun komunikasi secara intensif satu sama lain. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan prinsip *mutual understanding* atau saling pengertian.

Sehingga nantinya, mereka yang tidak memenangkan pilkada ini tidak berkecil hati dan mampu menyalurkan ekspresi kekecewaan mereka melalui saluran yang tepat, sesuai aturan. Misalnya, kandidat yang merasa mengalami kecurangan oleh lawanandingnya bisa secara bijak melayangkan protes. Yakni mengajukan keberatan di pengadilan. Di mana bukti dan fakta merupakan aspek penting dalam penyelesaian perselisihan.

Sebaliknya, ujaran kebencian seperti provokasi, fitnah, dan pencemaran nama baik merupakan hal yang bersifat kontraproduktif. Maka harus disadari bersama, bahwa itu hanya akan memicu konflik dan tindakan kriminal yang merugikan semua pihak.

Di sisi lain, Komisi Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) harus mampu menjaga netralitas. Ketelitian, transparansi, dan konsistensi dalam menjelaskan peraturan permainan kepada semua pihak merupakan hal yang tidak bisa ditawar.

Kedua, ketika berbicara tentang diseminasi informasi, KPPS juga bisa memicu hadirnya konflik. Kecurigaan bahwa anggota komisi memfavoritkan salah satu kandidat terkadang juga muncul sebagai bagian dari dinamika pemilu.

Sehingga pola informasi antara KPU dan para kandidat tidak jarang dipertanyakan. Ada pola-pola informasi yang sering tidak jelas. Misalnya daftar pemilih tetap (DPT), distribusi bahan, jadwal rekapitulasi, dan hal-hal terkait urusan teknis lainnya yang masih menjadi pekerjaan rumah sampai sekarang.

Permasalahan terkait lainnya adalah mengenai masih sering terjadinya apa yang diistilahkan oleh Bavelas, penulis buku *pragmatics of human communication* dengan *equivocal communication* (EC).

EC sendiri bisa diartikan sebagai sebaran pesan yang bersifat tidak jelas, tidak langsung, dan rumit. Sehingga sering menimbulkan kebingungan. Ketika EC terjadi dalam hal-hal yang perlu segera diinformasikan kepada publik, maka perselisihan menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari.

Misalnya informasi mengenai prosedur kampanye, prosedur rekapitulasi suara, dan hal-hal yang dianggap sebagai pelanggaran yang harus dikomunikasikan dengan jelas kepada masyarakat. Publik memerlukan aturan main yang bersifat transparan. Sehingga pemilu dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Ketiga yang menyebabkan konflik adalah adanya agresi dominan para elite politik. Mengacu pada teori komunikatornya Dominic A Infante, ada dua jenis perilaku agresif dominan para komunikator. Yakni kecanduan berdebat dan agresivitas verbal.

Agresivitas verbal ini mencakup penghinaan, kata-kata ancaman, dan ejekan emosional yang memunculkan amarah, rasa malu bahkan pelanggaran. Maka, tokoh masyarakat, pemimpin agama, tokoh pemuda, dan pemuka pendapat lainnya harus berpartisipasi dalam mengampanyekan pilkada serentak yang penuh rasa damai.

Idealnya, manajemen kinerja pemilu bisa diukur melalui partisipasi politik, baik bersifat konvensional maupun non-konvensional. Partisipasi konvensional bisa diamati dari jumlah pemilih. Semakin banyak pemilih yang golongan putih (golput), terutama jika jumlah mereka yang abstain melebihi margin paslon pemenang, artinya semakin buruk partisipasi publik terhadap pemilu.

Namun, prakarsa publik untuk mengawas manajemen pilkada serentak juga sangatlah diperlukan. Partisipasi non-konvensional seperti ini muncul di Pilpres 2014 dari *platformkawalpemilu.org* yang mencoba membandingkan data KPU dari sisi rekapitulasi suara.

Inilah saat bagi masyarakat untuk bersikap kritis dan waspada dalam konteks demokratisasi lokal. Jangan sampai para cukong, pengusaha, dan politikus busuk terus mengambil alih kekuasaan di daerah.

Minggu tenang setelah musim kampanye paslon yang baru saja selesai menjadi kesempatan bagi para pemilih mengevaluasi para paslon menjelang hari pemilihan. Kampanye yang

berorientasi pada citra pada akhirnya harus kita konfrontasikan dengan rasionalitas politik di lapangan.

Dengan mengacu pada tradisi neo-weberian, kiranya ada dua jenis rasionalitas manusia; yakni rasionalitas substantif dan rasionalitas instrumental. Rasionalitas substantif menjadikan kita memandang keterlibatan politik sebagai manifestasi dari prinsip, keyakinan, dan idealisme bahwa demokrasi merupakan jalan guna mencapai kesejahteraan sosial.

Keterlibatan kita dalam politik harus menjadi bagian dari identitas kita sebagai manusia mulia ciptaan Tuhan dan bukan sekadar korban dari instrumen reproduksi citra. Masa tenang inilah waktu bagi kita memikirkan mobilisasi kampanye paslon mana yang berorientasi pada realitas, dan bukan sekadar berorientasi pada citra.

Mari ingat-ingat kembali kampanye paslon mana yang mampu mengungkap momen kebenaran tentang seberapa besar para paslon memahami permasalahan nyata, faktual, substantif, dan penting di sekitar kita. Karena inilah saatnya bagi kita memilih paslon yang tidak sekadar menawarkan solusi abstrak imajiner demi mewujudkan Kaltim sejahtera yang merata dan berkeadilan.